

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Membangun Cadangan Jagung Pemerintah, Menjawab Kelangkaan dan Harga Jagung Melambung

DASAR PEMIKIRAN

Majunya industri perunggasan nasional, tidak lepas dari komponen pendukung seperti industri pakan ternak yang juga mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada 2011, produksi pakan ternak sektor komoditas (unggas, babi, dan ikan) hanya 11,3 juta ton, dan pada 2020 produksi pakan melonjak sebesar 21,7 juta ton. Rantai pasok bahan pakan ternak industri unggas mencapai 80 – 85 %. Jagung merupakan komponen utama yaitu 50%– 60%, dengan asumsi kebutuhan jagung sebesar 8 juta ton pertahun atau 600 ribu hingga 700 ribu ton per bulan untuk pabrik pakan ternak (*feedmill*) dan peternak mandiri ayam petelur dan ayam *broiler* yang mengolah sendiri (*self mixing*).

KAJIAN EMPIRIS

Saat ini, kebutuhan jagung *feedmill* dan *self mixing* seratus persen dipasok dalam negeri, dan selalu menjadi rebutan. Stok jagung di *feedmill* dan *self mixing* sangat menipis terkait lamanya panen petani karena curah hujan yang tinggi sehingga mengganggu masa panen. Meskipun demikian, pasca panen jagung juga tidak difasilitasi dengan baik sehingga mengganggu kualitas jagung di petani. Padahal peternak dan *feedmill* membutuhkan jagung dalam waktu dekat dan waktu panjang untuk menjaga kontinuitas pasokan pakan unggas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan sistem Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) karena produksi jagung tidak merata setiap bulannya. Melalui BUMN Bulog sebagai stabilisator dapat mengendalikan harga jagung dengan baik di tingkat produsen maupun konsumen.
2. Pemerintah melalui Kemendag perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengembangkan

Sistem Resi Gudang (SRG) di lokasi yang berdekatan dengan sentra produksi jagung. Juga Kemendag dan Kementerian dapat berkoordinasi untuk mensinergikan data lokasi mesin pengering (*dryer*) dan gudang SRG untuk penanganan pasca panen.

3. Pemerintah perlu mengkoordinasikan dengan pihak kapal ternak, untuk pengangkutan bahan pakan supaya biaya angkut lebih murah dalam masalah logistik.
4. Pemerintah perlu mengedukasi petani mengenai hasil panen jagung agar sesuai harapan konsumen atau pabrik pakan ternak. Melalui menerapkan pola Intensifikasi dan Ekstensifikasi guna mempertahankan kualitas dan kuantitas jagung dengan baik untuk memenuhi kebutuhan jagung di masa akan datang.
5. Pemerintah harus memperbaiki dan sinkronisasi data, untuk perencanaan memprediksi produksi jagung dengan baik dan benar untuk kebutuhan pakan ternak. Karena 90% jagung domestik diserap oleh industri pakan ternak sedangkan kebutuhan jagung untuk konsumsi pangan (manusia) sebesar 390 ribu ton per tahun.
6. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari pelaku industri dan pemasok jagung mengenai kekurangan jagung yang berimplikasi lonjakan harga. Hal ini terjadi berkali-kali pada Februari-Maret. Jika 2 bulan sebelumnya dapat diantisipasi maka harga jagung cenderung stabil di pasaran.
7. Pemerintah perlu menentukan Harga Acuan Tertinggi-Terendah (HET) jagung, agar seperti beras begitu ada HET maka semua terselesaikan supaya petani jagung tidak kelimpungan.
8. Pemerintah perlu memberikan dukungan peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyediaan pembiayaan (KUR), ketersediaan benih unggul dan pupuk.
9. Penting dilakukan inovasi pakan untuk mengurai ketergantungan impor bahan pakan yang amat dibutuhkan. Untuk efisiensi, pasokan bahan pakan harus stabil dalam manajemen produksi ternak. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus menemukan titik optimum dalam konsep skala ekonomi peternakan.
10. Pemerintah perlu mendorong industri untuk dapat melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan harga pakan dan DOC lebih murah sehingga berdaya saing di kancah global.